



**MENGERAKAN PEREKONOMIAN MELALUI PEMULIHAN USAHA DAN INDUSTRI
MIKRO KECIL MENENGAH PASCA BENCANA GEMPA BUMI DI NUSA TENGGARA
BARAT**

Oleh

Sri Maryanti¹⁾, Iga Oka Netrawati²⁾ & Faezal³⁾
^{1,2,3} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram
Email: 1maryanti.sri88@gmail.com

Abstrak

Bencana gempa bumi lombok tanggal 5 agustus 2018 menyisakan permasalahan belum pulihnya perekonomian ntb pasca gempa. Sebagai provinsi yang ditopang oleh sektor pariwisata, lesunya pariwisata akibat gempa juga berimplikasi pada lemahnya sector-sektor ekonomi lainnya. Program pemulihan umkm (usaha mikro kecil menengah) dan ikm (industri kecil menengah) yang adil, merata, dan tepat sasaran merupakan strategi yang diambil untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Strategi ini dirasa paling mampu untuk memberikan sinergi dengan sektor-sektor ekonomi lainnya, tidak terkecuali dengan sektor pariwisata. Keberadaan umkm dan ikm sering kali terkait erat dengan keberadaan destinasi pariwisata yang menjadi salah satu andalan penggerak ekonomi ntb. Tujuan penelitian ini adalah memberikan deskripsi sebaran umkm dan ikm yang ada di ntb kepada berbagai pihak, sehingga memudahkan pelaksanaan program pemulihan umkm dan ikm guna menggerakkan kembali perekonomian. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, metode pengumpulan data yaitu studi literatur, teknik analisis data menggunakan *crossstab*. Hasil dari penelitian menunjukkan persentase 3 dari 10 kota/kabupaten yang memiliki jumlah umkm terbanyak adalah lombok timur 24,85 %, lombok tengah 19,94 %, lombok barat 18,66 %, sedangkan ikm adalah mataram 18,75 %, lombok tengah 18,21 %, lombok barat 15,54 %. Namun jika dilihat dari dampak kerusakan gempa yang ditimbulkan, maka daerah lombok utara, lombok barat dan lombok timur merupakan daerah yang paling berhak untuk mendapatkan pemulihan umkm dan ikm.

Kata Kunci : Perekonomian, Umkm, Ikm & Pasca Gempa

PENDAHUALUAN

Gempa bumi dengan Magnitudo 7 melanda Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada hari Minggu tanggal 5 Agustus tahun 2018. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat bahwa pusat gempa berada pada titik koordinat 8,37 LS dan 116,48 BT dengan kedalaman 15 kilometer, berada di 27 km timur laut Lombok Utara (Media, n.d.). Gempa tidak hanya dapat dirasakan di daerah Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Timur, Mataram, Lombok Tengah, Sumbawa Barat dan Sumbawa Besar tapi juga Bali (antara, 2018). Berdasarkan hasil validasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per September 2018, kerugian yang ditimbulkan akibat gempa diperkirakan sebesar Rp 12,1 Trilyun. Total kerugian ini didasarkan pada banyaknya korban jiwa dan

luka-luka serta bangunan berupa rumah warga dan fasilitas sosial dan ekonomi yang rusak akibat gempa (Hidayat, 2018a)

Bencana gempa bumi tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik terhadap bangunan tetapi juga menyebabkan lumpuhnya perekonomian masyarakat NTB. Badan Pusat Statistik (BPS) NTB menyebutkan pertumbuhan ekonomi NTB khususnya pasca gempa (triwulan III/2018) paling rendah di Indonesia (Hidayat, 2018b). Pemerintah daerah dituntut bekerja keras untuk mengatasi dampak bencana yang berupa fisik maupun non-fisik. Menurut Warfield dalam Agustiyo (Agustiyo, 2011) terdapat dua klasifikasi kegiatan pasca bencana (*Post Disaster Activities*) yang harus segera dilakukan yaitu yang pertama adalah kegiatan pasca bencana jangka pendek (*short term post disaster*



activities). Kegiatan ini berupa kegiatan tanggap darurat dari dampak bencana yang ada, seperti pertolongan pemenuhan kebutuhan dasar misalnya makanan, perawatan, dan hunian sementara. Kedua adalah kegiatan pasca bencana jangka panjang (*long term disaster activities*) yang kegiatannya meliputi segala usaha untuk mengembalikan seluruh aspek ke kondisi semula atau bahkan kondisi yang lebih baik dari sebelum bencana contohnya kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

Delapan bulan berlalu pasca gempa bumi, kondisi perekonomian masyarakat NTB belum sepenuhnya pulih. Sebagai Provinsi yang salah satunya ditopang oleh sektor pariwisata, lesunya pariwisata akibat gempa juga berimplikasi pada lemahnya sector-sector ekonomi lainnya. Hal ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, Pemerintah Daerah dituntut untuk sigap dan bergerak cepat dalam merecovery perekonomian masyarakat. Tidak adil tentunya jika membebankan tugas berat ini hanya kepada satu pihak, akan tetapi diperlukan koordinasi dan kerja sama yang baik antara pihak pemerintah dengan seluruh komponen masyarakat. Strategi-strategi pemulihan ekonomi pasca gempa perlu dirancang dengan cermat. Sementara sektor pariwisata yang menjadi tumpuan perekonomian masyarakat NTB masih memerlukan rehabilitasi dan rekonstruksi yang membutuhkan waktu cukup lama (baik untuk membangun kembali hotel-hotel dan infrastruktur pendukung maupun usaha-usaha untuk memulihkan kembali kepercayaan para wisatawan), pemerintah serta pihak-pihak terkait harus segera mencari sumber penghasilan lain bagi masyarakat sebagai solusi guna menggerakkan kembali roda perekonomian.

Salah satu strategi pemulihan ekonomi pasca gempa yang dianggap paling cermat adalah melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM). Pemulihan UMKM dan IKM yang ada di NTB merupakan strategi yang dirasa paling mampu untuk memberikan sinergi dengan sektor-sektor ekonomi lainnya, tidak terkecuali dengan sektor pariwisata. Keberadaan UMKM dan IKM sering

kali terkait erat dengan keberadaan destinasi pariwisata yang menjadi salah satu andalan penggerak ekonomi NTB. UMKM dan IKM juga dipandang sebagai suatu sektor yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup banyak untuk mengatasi masalah pengangguran pasca gempa. Bahkan, secara nasional UMKM memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian bangsa karena merupakan usaha padat karya yang membutuhkan banyak tenaga kerja (Wuryandani & Meilani, 2013). Tidak heran, berbagai pihak terkait turut mengambil peran untuk membantu mengembangkan UMKM dan IKM ini. Deputy Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM mengungkapkan strategi pemulihan UMKM perlu dilakukan sebagai upaya menjaga stabilitas koperasi dan UMKM pasca bencana di NTB (antaranews.com, 2019). Kepala Kantor Perwakilan BI (Bank Indonesia) NTB mengungkapkan bahwa peran UMKM dalam mendorong pembangunan ekonomi sudah tidak dapat diragukan lagi, sehingga BI termotivasi untuk ikut berkontribusi dalam pengembangan UMKM (Republika.co.id, 2019). Tidak ketinggalan, Dinas Koperasi UKM NTB juga memiliki berbagai program yang siap dilaksanakan untuk pengembangan UMKM Pasca gempa. Sejalan dengan hal ini, Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB mengatakan bahwa “NTB memiliki potensi bahan baku industri yang sangat besar”. Potensi ini bisa dimanfaatkan dalam rangka peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat dengan cara mendorong IKM untuk turut serta dalam upaya mengolah bahan baku yang ada menjadi sebuah produk yang memiliki *value added* (Republika.co.id, 2019).

Pemprov NTB, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, dituntut untuk mengawal terselenggaranya semua bentuk bantuan (materi ataupun non materi) dari berbagai pihak, terlaksana secara adil dan merata guna mencegah kecemburuan sosial pada masyarakat disemua daerah terdampak gempa (Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Timur, Mataram, Lombok Tengah, Sumbawa Barat dan Sumbawa



Besar). Kebutuhan akan tersedianya data terkait dengan sebaran dan jumlah UMKM dan IKM secara rinci dirasa sangat penting dalam upaya menjamin program-program bantuan terdistribusi secara adil, merata dan tepat sasaran, sehingga pulihnya perekonomian NTB pasca bencana gempa bumi dapat terealisasi dengan baik.

LANDASAN TEORI

Bencana Gempa Bumi dan Penanggulangan Pasca Bencana

Undang-Undang (UU) terkait dengan Penanggulangan Bencana, mendefinisikan bencana sebagai serangkaian peristiwa yang dapat mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. (BNPB, n.d.). Selanjutnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjelaskan gempa bumi merupakan gejala alamiah berupa gerakan guncangan atau getaran tanah yang ditimbulkan oleh adanya sumber-sumber getaran tanah akibat terjadinyapatahan atau sesar akibat aktivitas tektonik, letusan gunungapi akibat aktivitas vulkanik, hantaman benda langit (misalnya meteor dan asteroid), dan/atau ledakan bom akibat ulah manusia. (BNPB, 2012)

Bencana gempa bumi pasti meninggalkan banyak dampak negatif bagi masyarakat, maka dari itu perlu dilakukannya sebuah penanggulangan bencana sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan seluruh masyarakat Indonesia termasuk perlindungan atas bencana. (Kemenkumham, 2007). Terdapat 4 (empat) aspek yang menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan penanggulangan Pasca bencana yaitu : 1) aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, 2) kelestarian lingkungan hidup, 3) kemanfaatan dan efektivitas, dan 4) lingkup luas wilayah. Selanjutnya Coppola dalam Setiageni

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems

(Setiageni, 2011) membagi tiga kegiatan utama yang harus segera dilakukan dalam penanggulangan bencana, yaitu :

1. Kegiatan pra-bencana, meliputi pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan serta peringatan dini
2. Kegiatan saat terjadi bencana, meliputi tanggap darurat, bantuan darurat dan pengungsian
3. Kegiatan pasca-bencana, meliputi pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi

Sedangkan untuk kegiatan pasca bencana (*Post Disaster Activities*) Menurut Warfield terdapat dua hal yang harus segera dilakukan yaitu kegiatan pasca bencana jangka pendek (*short term post disaster activities*). Kegiatan ini berupa kegiatan tanggap darurat dari dampak bencana yang ada, seperti pertolongan pemenuhan kebutuhan dasar misalnya makanan, perawatan, dan hunian sementara. Kegiatan selanjutnya adalah pasca bencana jangka panjang (*long term disaster activities*) yang kegiatannya meliputi segala usaha untuk mengembalikan seluruh aspek ke kondisi semula atau bahkan kondisi yang lebih baik dari sebelum bencana contohnya kesehatan, pendidikan dan ekonomi. (Agustiyo, 2011).

Usaha Mikro dan Industri Mikro kecil Menengah

Menurut UU Nomor 20 tahun 2008 yang dimaksud dengan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan milik orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak/cabang dari usaha menengah/besar lainnya. Menurut UU ini kriteria dari suatu usaha mikro kecil menengah itu adalah memiliki kekayaan bersih diantara Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00. (Kepala Biro Bidang Perekonomian dan Industri, 2008). Menurut BPS, Usaha Kecil dan Menengah adalah suatu bentuk usaha berskala usaha rumah tangga dimana usaha kecil mempunyai pegawai antara 1-19 orang. Sementara usaha menengah mempunyai pegawai antara 20-99 orang (Jauhari, 2010). Tambunan



menjelaskan kriteria umum dari usaha mikro adalah usaha perorangan yang merangkap sebagai pemilik sekaligus pengelola, dan biasanya berlokasi di pedesaan atau kota-kota kecil yang orientasinya adalah sektor pertanian, makanan, minuman dan tembakau (Fahren, 2011). Masih dalam Fahren, bank dunia juga mendefinisikan usaha mikro menengah itu sebagai suatu usaha yang memiliki jumlah karyawan antara 10 - 300 orang, dimana pendapatan dan asetnya berkisar pada nilai kurang lebih \$100 ribu sampai dengan tidak lebih dari \$15 juta.

Berdasarkan peraturan menteri perindustrian, yang dimaksud dengan Industri Kecil Menengah (IKM) adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menjadi barang yang memiliki nilai tambah atau manfaat lebih serta memiliki 19-20 karyawan dengan nilai investasi sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) (Menteri Perindustrian, 2016). Asosiasi UKM dan IKM seluruh Indonesia (AUSI) mendefinisikan IKM sebagai suatu usaha yang berfokus pada kegiatan memproduksi berbagai macam produk untuk memenuhi keperluan aktifitas makhluk hidup atau orang lain. ("MEMAHAMI PENGERTIAN UKM DAN IKM BERDASARKAN PANDANGAN AUSI," n.d.). Masih menurut AUSI, jika IKM berfungsi dalam proses produksi barang, maka UMKM yang memiliki peran dalam menjual kembali berbagai produk yang dihasilkan oleh IKM tersebut. Jika suatu usaha terlibat di dalam kedua fungsi ini, yaitu memproduksi sekaligus melakukan penjualan produk (pemasaran secara langsung), maka usaha tersebut dapat dikategorikan sebagai usaha UMKM dan IKM. Tidak heran dalam dunia bisnis yang lebih luas usaha kecil menengah dan industri kecil menengah merupakan dua hal yang saling terkait dan sulit untuk dibedakan atau dipisahkan.

Peranan Usaha dan Industri Mikro Kecil Menengah dalam Pemulihan ekonomi Secara Umum

Banyak ahli ekonomi bersepakat mengenai bagaimana keberadaan usaha kecil

Vol.14 No.4 Nopember 2019

menengah mengambil peran penting bagi pertumbuhan ekonomi disuatu Negara, baik itu berkembang bahkan Negara maju sekalipun. Negara kita memiliki bukti nyata bagaimana peran keberadaan usaha kecil menengah mampu tetap bertahan menghadapi krisis ekonomi yang di hadapi Indonesia pada saat itu dikala beberapa perusahaan dengan skala besar terbukti tidak mampu bertahan dalam menghadapi krisis. Marpaung dalam Usman,dkk (Usman & Pakarti, 2016) mengungkapkan terdapat beberapa keunggulan yang dimiliki UMKM dibanding usaha besar, yaitu : 1) Inovasi dalam pengembangan produk, 2) Hubungan kemanusiaan yang akrab, 3) Kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak, 4)Fleksibilitas atau kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat,dan 5) Terdapatnya dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan. Sedangkan Sulistyastuti mengemukakan kontribusi UMKM di Negara-negara maju adalah berperan sebagai subkontraktor yang menyediakan berbagai input bagi usahayang berskala besar dan dapat meningkatkan ekspor sekaligus sumber inovasi.(Ling, 2013).

Kontribusi riil lainnya dari usaha kecil menengah yang dirasa cukup signifikan dalam memacu pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah dikarenakan usaha ini dekat dengan rakyat kecil dan memiliki daya serap tenaga kerja yang besar. Statistik pekerja Indonesia menunjukkan bahwa 99,5 % tenaga kerja Indonesia bekerja di bidang UMKM menurut Kurniawan dalam Jauhari (Jauhari, 2010). Bahkan pemerintah mencanangkan UMKM termasuk dalam salah satu fokus program pembangunan nasional dan kebijakan terkait usaha kecil menengah dituangkan dalam sejumlah Undang-undang dan peraturan pemerintah.

Tidak jauh berbeda dengan usaha kecil menengah, keberadaan Industri Kecil Menengah (IKM) juga memiliki potensi yang sama dengan UMKM dalam upaya perbaikan perekonomian. Hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada IKM. IKM merupakan salah satu tumpuanutama pemerintah

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>



dalam menciptakan lapangan kerja baru terutama setelah krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 lalu. Tidak heran IKM juga menjadi bagian penting dari perekonomian suatu negara termasuk Indonesia. Sebagai gambaran, walaupun sumbangan sektor IKM dalam output nasional (PDRB) tahun 2000 hanya 56,7 persen dan dalam ekspor non migas hanya 15 persen pada tahun 2000, namun IKM memberikan kontribusi sebanyak 99 persen dalam jumlah badan usaha di Indonesia serta memiliki andil sebanyak 99,6 persen dalam penyerapan tenaga kerja menurut Kompas dalam Lestari (Lestari, 2010)

Perkembangan indikator makro UKM/IKM tahun 2008 menurut Berita Resmi Statistik dalam Usman, dkk (Usman & Pakarti, 2016) adalah sebagai berikut:

1. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2007 tumbuh mencapai 6,4% untuk UKM/IKM dan Usaha Besar (UB) tumbuh 6,2%. Dibandingkan tahun 2006 pertumbuhan PDB UKM/IKM hanya 5,7% dan PDB Usaha Besar hanya 5,2%.
2. Pada tahun 2007 kontribusi UKM/IKM pada PDB Indonesia mencapai Rp. 2.121,3 triliun atau 53,6 persen dari total PDB Indonesia.
3. Pertumbuhan PDB UKM/IKM tahun 2007 terjadi di semua sektor ekonomi.
4. Jumlah populasi UKM/IKM pada tahun 2007 mencapai 49,8 juta unit usaha atau 99,99 persen terhadap total unit usaha di Indonesia, sementara jumlah tenaga kerjanya mencapai 91,8 juta orang atau 97,3 persen terhadap seluruh tenaga kerja Indonesia.
5. Hasil ekspor hasil produksi UKM/IKM selama tahun 2007 mencapai Rp. 142,8 triliun atau 20 persen terhadap total ekspor non migas nasional sebesar Rp. 713,4 triliun
6. Nilai investasi fisik UKM/IKM yang dinyatakan dengan angka Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada tahun 2007 mencapai Rp. 462,01 triliun atau 46,96 persen terhadap total PMTB Indonesia

Belajar dari sejarah krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997 ternyata telah membuka cakrawala bangsa Indonesia tentang betapa rapuhnya sistem ekonomi yang dibangun hanya dengan segelintir konglomerasi (Lestari, 2010). Maka dapat dikatakan bahwa UKM/IKM adalah suatu solusi dari sistem perekonomian yang sehat dan perlu diperhitungkan untuk dapat meningkatkan daya saing pasar serta stabilisasi sistem ekonomi yang ada (Usman & Pakarti, 2016)

Pemulihan Usaha dan Industri Mikro Kecil Menengah untuk Menggerakkan Perekonomian Pasca Bencana Gempa Bumi

Indonesia merupakan negara yang rawan bencana karena berada pada lempengan Indo-Australia dan Eurasia. Kondisi ini yang mengakibatkan rentannya Indonesia pada berbagai jenis bencana alam seperti gunung meletus dan gempa bumi bahkan diikuti oleh tsunami. (Kurniasari, 2017). Sebagaimana lazimnya suatu bencana, dampak yang ditimbulkan seringkali melumpuhkan aktivitas dan kegiatan masyarakat tidak terkecuali kegiatan ekonomi. Ekonomi lokal individu ditopang oleh faktor dimana termasuk didalamnya adalah pariwisata, pertambangan, pabrik produksi, pertanian, kerajinan tangan, serta pendidikan. Kehilangan pekerjaan, kehilangan faktor produksi, dan kehilangan kesempatan bisnis merupakan dampak bencana terhadap kejatuhan kondisi ekonomi.

Pengangguran adalah salah satu konsekuensi umum akibat dari sebuah bencana. Kehilangan pekerjaan datang sebagai dampak negatif tambahan pada korban yang tidak hanya fokus dalam menutupi kerusakan rumah dan properti mereka, tetapi juga bagaimana menemukan sumber penghasilan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Statistik di Amerika menunjukkan bahwa 25 % bisnis kecil terpaksa gulung tikar akibat dari kerugian yang disebabkan oleh bencana dan tidak pernah membuka usahanya kembali serta 40-60% bisnis kecil lainnya tutup secara permanen (Setiageni, 2011). Korban yang tidak bekerja menyebabkan tidak mempunyai membeli barang-barang di pasar



lokal, sehingga mungkin akan melemahkan ekonomi lokal. Sebaliknya bisnis kecil yang dapat mengambil peran dalam mengatasi kelangkaan barang-barang, justru banyak yang gulung tikar. Hal ini ikut menambah beban perekonomian pasca bencana.

Proses pemulihan pada sektor ekonomi di kawasan pasca bencana harus disesuaikan dengan Peraturan BNPB Nomor 11 Tahun 2008 (BNPB, 2008). Di dalam peraturan tersebut dijelaskan tentang pedoman rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, beserta indikator-indikatornya seperti yang akan dijelaskan selanjutnya. Pada ruang lingkup pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, pemulihan pasca bencana khususnya bidang ekonomi mencakup:

- a) Yang dimaksud dengan pemulihan sosial ekonomi budaya adalah upaya untuk memfungsikan kembali kegiatan dan/atau lembaga sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di daerah bencana.
- b) Kegiatan dan lembaga ekonomi adalah kegiatan dan/atau hubungan-hubungan kemasyarakatan di bidang ekonomi yang meliputi produksi, distribusi dan konsumsi barang-barang ekonomi.
- c) Kegiatan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya ditujukan untuk menghidupkan kembali kegiatan dan lembaga sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di daerah bencana seperti sebelum terjadi bencana.

Indikator dari proses pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi sangat diperlukan untuk mengetahui hasil dan capaian yang sudah dilakukan khususnya pada sektor ekonomi, yaitu sebagai berikut :

- a) Terselenggaranya kegiatan produksi dan distribusi barang-barang bernilai ekonomi baik perorangan maupun lembaga.
- b) Terselenggaranya transaksi ekonomi baik di pasar maupun di luar pasar baik perorangan maupun lembaga.
- c) Meningkatnya jumlah produksi dan distribusi barang-barang bernilai ekonomi baik perorangan maupun lembaga.
- d) Meningkatnya jumlah anggota masyarakat dan atau lembaga ekonomi yang terlibat

dalam kegiatan produksi dan distribusi barang-barang ekonomi.

Dalam rangka mencapai indikator diatas, pemerintah daerah beserta pihak terkait harus bekerja samamenentukan kebijakan dalam penanganan wilayah pasca bencana. Sesuai dengan kebutuhanrehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, diperlukan suatu penanganan khusus untukmengembalikan kondisi wilayah bencana sepertisebelum bencana terjadi. Menggerakkan roda perekonomian bukan merupakan perkara mudah, terlebih pada situasi pasca bencana. Banyak factor yang saling terkait dan harus bersinergi untuk mewujudkannya. Salah satu factor penting yang menjadi perhatian adalah sektor perdagangan dan industri. Sektor ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber penghidupan dan pembangunan masyarakat, tetapi juga dapat menghasilkan efek yang lebih luas yaitu sebagai penggerak roda perekonomian suatu daerah bahkan suatu Negara (Nu'man, 2005). Mengembalikan ekonomi lokal harus menjadi prioritas utama dalam pemulihan ekonomi bagi para perencana menurut Rittinghouse dan Ransome dalam Setiageni (Setiageni, 2011). Berbicara ekonomi lokal tidak bisa lepas dari UMKM/IKM, karena dalam perekonomian Indonesia, Usaha dan industri mikro, kecil dan menengah (UMKM/IKM) merupakankelompok usaha yang memiliki jumlah palingbesar. Selain itu kelompok ini terbukti tahanterhadap berbagai macam guncangan krisisekonomi yang mungkin memiliki dampak yang hampir sama dengan situasi ekonomi pasca bencana sebagaimana pemaparan sebelumnya. Maka sudah menjadi keharusanuntuk dilakukan upaya penguatan kelompokusaha dan industri mikro, kecil dan menengah yangmelibatkan banyak kelompok masyarakat didalamnya. (Fahren, 2011). Upaya penguatan atau pemulihan dapat dilakukan dari berbagai aspek, salah satunya melalui pendanaan UMKM/IKM. Tidak kalah pentingnya juga pemulihan UMKM/IKM ini dirasa mampu menjawab semua kriteria dari indikator pulihnya suatu perekonomian menurut Peraturan BNPB Nomor 11 Tahun 2008.



METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dan menjadi mampu untuk menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi (Sekaran, 2006). Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk memaparkan dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh bencana gempa bumi Lombok tanggal 5 Agustus tahun 2018 serta hal-hal yang dapat membantu pemerintah beserta pihak-pihak terkait dalam upaya membangkitkan kembali perekonomian khususnya melalui program UMKM/IKM di wilayah yang terdampak gempa.

Jenis data yang digunakan adalah kualitatif berupa data-data yang tidak berbentuk angka melainkan penjelasan atau uraian yang diperoleh dari berbagai sumber bacaan dan literatur. Kemudian data kuantitatif berupa data dalam bentuk angka-angka yang dapat diukur atau dihitung secara langsung seperti jumlah UMKM dan IKM atau industri non formal lainnya. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang tidak bersumber dari sumber utama melainkan dalam bentuk dokumen, catatan, arsip dari beberapa lembaga yang memiliki kaitan dengan penelitian ini seperti Dinas koperasi dan Dinas perindustrian NTB dan lembaga terkait lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi literatur atau dokumen. Hal ini terkait dengan sumber data dalam penelitian ini yang bersumber hanya dari data sekunder. Dimana studi literatur atau studi dokumen adalah mengumpulkan data pendukung seperti dokumen, jurnal, tesis, disertasi, skripsi, buku, arsip dan berbagai dokumen pendukung lainnya yang mengulas tentang UMKM dan IKM dalam kaitannya dengan pemulihan ekonomi pasca bencana, termasuk dari media massa yang memiliki kredibilitas tinggi. (Kurniasari, 2017)

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tabulasi silang

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems

(*Crosstab*). Dimana *Crosstab* pada prinsipnya menyajikan data dalam bentuk tabulasi yang meliputi baris dan kolom. Data yang digunakan untuk penyajian *Crosstab* adalah data yang berskala nominal atau kategori (Gozali, 2005). Contohnya seperti data berupa jumlah dan jenis UMKM/IKM yang tersebar di seluruh wilayah NTB.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Kerugian dan Kerusakan Akibat Bencana Gempa Bumi Lombok

Gempa bumi Lombok yang terjadi pada tanggal 5 Agustus 2018 merupakan gempa bumi yang diakibatkan aktivitas sesar naik Flores (*Flores Back Arc Thrust*) menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG (antara, 2018). Berdasarkan rilis BMKG, gempa yang berkekuatan 7 Magnitudo ini berpotensi tsunami sesaatsebelum akhirnya peringatan dini tsunami kemudian dinyatakan selesai. Gempa ini merupakan gempa utama (*Main Shock*) dari rangkaian gempa sebelumnya yang terjadi pada tanggal 29 Juli tahun 2018 dengan Magnitudo 6,4. (Media, n.d.-a). Gempa-gempa susulan masih sering terjadi, menurut Zulfakriza, seorang ahli geofisika mengungkapkan setidaknya terjadi 6 gempa bumi berkekuatan besar yang bisa dirasakan dengan rentang 5 sampai puncaknya 6,9 Magnitudo dalam kurun waktu akhir Juli sampai September 2018 (Media, n.d.-b). BNPB berhasil mencatat kerugian ekonomi yang dialami oleh NTB sesaat setelah terjadi bencana gempa Lombok, tepatnya 9 Agustus 2018. Berdasarkan pada data yang telah dihimpun kerugian mencapai 5,04 Triliun. Kerugian ini masih bersifat sementara yang mungkin saja bisa bertambah. Sumber kerugian ini diperkirakan berasal dari beberapa sektor, dengan rincian sektor permukiman sebesar Rp 3,82 triliun, karena puluhan ribu rumah penduduk rusak berat, bahkan banyak yang rata dengan tanah. Kemudian infrastruktur Rp 7,5 miliar, ekonomi produktif sebesar Rp 432,7 miliar, sosial budaya sebesar Rp 716,5 miliar, serta lintas sektor sebesar Rp 61,9 miliar. Selanjutnya kerusakan dan kerugian terbanyak di masing-masing



daerah terdampak gempa, tercatat berada di Kabupaten Lombok Utara sebesar Rp 2,7 triliun. Selain itu, untuk beberapa wilayah lain, seperti di Lombok Barat mencapai lebih dari Rp 1,5 triliun, di Lombok Timur sebesar Rp 417,3 miliar, Lombok Tengah Rp 174,4 miliar, dan Kota Mataram Rp 242,1 miliar. (Chairunnisa, 2018). Berbeda dengan data sebelumnya yang masih bersifat sementara, pada bulan September 2018, BNPB telah berhasil merampungkan validasi dampak gempa Lombok sepanjang bulan Agustus dan merilis kerugian akibat gempa tersebut mencapai angka 10,1 Triliun dimana total kerusakan mencapai 8,6 Triliun, sedangkan kerugian mencapai 2 Triliun. Berdasarkan validasi ini juga telah diketahui secara pasti berapa banyak korban jiwa, rumah yang hancur, dan fasilitas publik yang rusak, seperti yang terlihat pada tabel berikut. (Hidayat, 2018a).

Meskipun total kerugian yang dialami oleh NTB pasca gempa bumi Lombok terbilang cukup besar yakni mencapai puluhan triliun, pemerintah tidak menetapkan kejadian ini sebagai bencana nasional. (Sicca, 2018). Sebagai gantinya pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kota Mataram, dan wilayah terdampak di Provinsi NTB.

Tabel 1. Jenis dan Jumlah Kerusakan yang ditimbulkan Bencana Gempa Bumi Lombok

No	Jenis Kerugian	Jumlah Kerusakan (Orang/Unit)	Keterangan dalam persentase (%)
1.	Korban Meninggal	564 Orang	467 jiwa (82,8%) berasal dari Lombok Utara, 97 jiwa (17,2 %) tersebar di daerah Lombok lainnya
2.	Korban Luka-luka	1.584 Orang	829 orang (52,3%) berasal dari Lombok Utara, sedangkan 755 orang (47,7 %) tersebar di daerah Lombok lainnya

3.	Rumah Rusak	167.000 Unit	55.924 unit (33,5 %) berada di Lombok Utara, 111.076 unit (66,5 %) tersebar di daerah Lombok lainnya
4.	Pengungsi	445.343 Orang	105.453 Orang (23,7 %) berasal dari Lombok Utara, sedangkan 339.890 (76,3%) orang berasal dari daerah Lombok lainnya
5.	Infrastruktur (Jembatan, Jalan, Terminal bus, Dermaga, Irigasi dan Bendungan)	214 Unit	Irigasi 97 unit (45%), Jalan 61 unit (28%), SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) dan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) 32 unit (15%). Dimana secara akumulasi, kerusakan infrastruktur terbanyak terjadi di Lombok Utara yaitu 85 unit (39,7%)
6.	Sekolah (PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB)	1.194 Unit	PAUD 254 unit (21,3%), 639 unit (53,5%) SD. Kemudian, SMP 155 unit (12,9%), SMA 72 unit (6%), SMK 56 unit (4,6%), dan SLB 8 unit (0,6%). Total kerusakan fasilitas pendidikan terbanyak terjadi di Lombok Utara dengan 294 unit sekolah (24,6%).
7.	Fasilitas Kesehatan (Poskesdes, Puskesmas, Rumah sakit, dan fasilitas kesehatan lainnya)	321 Unit	Pos Kesehatan Desa (Poskedes) sebanyak 115 unit (35,85%), Puskesmas 86 unit (26,79 %), rumah sakit 9 unit (2,8%) dan 111 unit (34,56%) fasilitas kesehatan lainnya. Dimana secara akumulasi, kerusakan fasilitas kesehatan terbanyak berada



			di Lombok Barat yaitu 26,48 %.
8.	Rumah Ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Vihara, Pura)	1143 Unit	Masjid rusak 630 unit (55,11%), 461 unit (40,33%) mushola, 1 unit (0,08%) gereja, 1 unit (0,08%) Vihara, dan 50 unit (4,37%) pura. dimana total kerusakan masjid terbanyak ada di Lombok Timur dengan 267 unit (23,35 %).
9.	Fasilitas Perekonomian (Pasar tradisional, Kios dan Toko, serta Hotel)	750 Unit	pasar tradisional 46 unit (6,1%), kemudian 566 unit (75,5%) kios dan toko, lalu 138 unit (18,4%) hotel. Secara akumulasi, kerusakan fasilitas ekonomi terbanyak di Lombok Barat yaitu 43,6 % yang terdiri dari 294 kios dan took serta 33 hotel. Sedangkan Lombok utara menderita kerusakan sebesar 17,3 % yang terdiri dari 25 unit pasar tradisional dan 105 unit hotel.

Sumber : Data Sekunder BNPB September 2018 (data diolah)

Pemulihan Usaha dan Industri Kecil Menengah dalam Menumbuhkan Perekonomian NTB Pasca Bencana Gempa Bumi

Bencana gempa bumi Lombok tidak hanya meninggalkan kerugian dan kerusakan seperti korban jiwa, kehilangan, kesedihan, dan rasa cemas di tengah masyarakat, tetapi juga membuat perekonomian di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) ikut terguncang. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB menyebutkan pertumbuhan ekonomi NTB, khususnya pasca

gempa pada triwulan III/2018 mengalami kontraksi sebesar minus 13,99 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2017. Hal ini disebabkan oleh empat sumber pertumbuhan ekonomi NTB mengalami pertumbuhan yang negatif, yaitu diantaranya pertambangan minus sebesar 13,81 persen, konstruksi minus sebesar 1,03 persen, pertanian minus sebesar 0,10 persen, dan lainnya minus sebesar 0,46 persen. Sementara itu empat sektor lainnya mengalami pertumbuhan positif, yaitu diantaranya perdagangan tumbuh sebesar 0,40 persen, jasa keuangan 0,27 persen, jasa kesehatan 0,14 persen, dan pemerintahan 0,09 persen. Sayangnya keempat sektor ini belum maksimal dalam menggenjot perekonomian NTB, ditambah lagi dengan terganggunya sektor pariwisata yang juga berdampak terhadap sektor lainnya, dianggap ikut memegang andil dalam menggerus pertumbuhan ekonomi NTB. (Hidayat, 2018b)

Melihat besarnya potensi sektor perdagangan dalam menumbuhkan perekonomian NTB pasca gempa, pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara aktif bekerja sama untuk mempersiapkan langkah-langkah kongkrit yang dapat mempermudah sektor perdagangan untuk terus tumbuh dan berkembang pesat. Langkah yang dianggap berperan penting dalam sektor perdagangan adalah dengan memperhatikan pelaku usaha atau UMKM/IKM yang terlibat di dalamnya. Sejauh ini terdapat beberapa langkah pemulihan UMKM/IKM yang diambil dalam mendukung sektor perdagangan guna menggenjot perekonomian NTB yaitu :

1. Menteri keuangan mewakili pemerintah pusat akan menghapuskan kredit-kredit sementara dan menyiapkan instrumen-instrumen bantuan seperti kredit ultra mikro. Upaya ini sejalan dengan Peraturan OJK Nomor 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam. Instruksi pemerintah ini kemudian dijalankan



- sejumlah bank-bank besar yang ada di Indonesia, misalnya PT. Bank Mandiri yang telah memberikan keringanan terhadap kewajiban atau restrukturisasi utang bagi debitur yang terdampak bencana di NTB. (medcom id, 2018). Dampak dari keringanan ini bagi para pelaku UMKM/IKM NTB adalah tidak perlu harus memusingkan membayar kredit bank, dan lebih fokus untuk bagaimana menata kembali usahanya.
2. Pemerintah daerah melalui dinas koperasi dan UMKM NTB akan memberikan dana stimulan kepada UMKM terdampak gempa yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kendatipun anggarannya terbatas yaitu sebesar 3 Miliar, diharapkan dana stimulan ini bisa membantu membangkitkan perekonomian masyarakat, khususnya pelaku UMKM (“Dinas Koperasi NTB Siapkan Dana Stimulan UKM Korban Gempa,” 2018)
 3. Dinas Koperasi dan UMKM NTB beserta instansi terkait lainnya seperti dinas perdagangan dan dinas perindustrian memiliki program-program khusus dalam mengangkat kembali UMKM melalui kegiatan-kegiatan seperti pameran (kegiatan pertemuan, produk-produk UMKM), dan kegiatan pemasaran lainnya seperti promosi-promosi secara online yang dapat menegaskan bahwa UMKM NTB masih tetap eksis. (“Dinas Koperasi NTB Siapkan Dana Stimulan UKM Korban Gempa,” 2018)
 4. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (Ditjen IKMA) melakukan kegiatan pembinaan dan pengembangan industri pasca bencana di NTB. Kegiatan ini dilakukan melalui fasilitasi peralatan (pembuatan) kopi, pengembangan IKM tempe dan rotan, pendampingan manajemen kelembagaan rumah kemasan, pengembangan WUB (wira usaha baru) IKM makanan, bimbingan teknis diversifikasi produk kain tenun, bimbingan teknis desain perhiasan mutiara, fasilitasi mesin atau peralatan perbengkelan roda dua dan lain-lain. (BeritaSatu.com, n.d.). Kegiatan pembinaan dan pengembangan ini dilakukan tidak hanya sebagai bentuk perhatian dan dukungan Kemenperin di NTB, tetapi juga turut serta memberikan efek yang baik terhadap pertumbuhan ekonomi NTB kedepannya.
 5. Ditjen IKMA baru-baru ini juga telah menyusun program penumbuhan dan pengembangan IKM melalui kegiatan yang diantaranya adalah Penumbuhan Wirausaha IKM seperti Seleksi bimbingan teknis dan kewirausahaan, startup capital, dan pendampingan bagi IKM, serta santripreneur. Kemudian pengembangan produk IKM melalui standarisasi, diversifikasi, hilirisasi, sertifikasi produk dan sertifikasi kompetensi, branding, HKI, Kemasan, Penguatan Sentra IKM melalui Esmart IKM, OVOP, penguatan kelembagaan sentra IKM, kemudahan akses bahan baku dan penolong, material center, pencegahan pencemaran industri, dan kemitraan melalui link and match, Restruktursisasi Mesin/Peralatan IKM. Strategi ini disusun karena IKM memiliki peran cukup penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, dan pengembangan sektor swasta yang dinamis. (“Kemenperin Susun Strategi Pengembangan IKM Tahun 2020 di Lombok,” n.d.)

Jumlah Usaha dan Industri Kecil Menengah yang tersebar di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB)

Sebelum membahas lebih jauh terkait dengan sebaran jumlah usaha mikro kecil dan menengah serta industri kecil dan menengah yang ada di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB), berikut akan dipaparkan data tentang luas daerah

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>



pada masing-masing kabupaten atau kota yang ada di NTB. Provinsi NTB sendiri terdiri dari dua Pulau yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dengan luas total wilayah mencapai 20.153,2 Km². Selanjutnya NTB dirinci menjadi 10 Kabupaten/Kota yang memiliki luas wilayah yang berbeda-beda. Berdasarkan tabel di bawah diketahui bahwa Kabupaten Sumbawa merupakan daerah yang memiliki luas wilayah yang paling besar yaitu 32,97% atau 6.643,98 Km², kemudian diikuti oleh Kabupaten Bima dengan luas wilayah sebesar 21,78 % atau 4.389,40 Km², selanjutnya Kabupaten Dompu menempati urutan ketiga dengan luas wilayah 2.324,60 Km² atau sebesar 11,53 %, baru kemudian Kabupaten Sumbawa Barat 9, 17%, Kabupaten Lombok Timur 7, 97%, Kabupaten Lombok Tengah 6%, Kabupaten Lombok Barat 5,23%, Kabupaten Lombok Utara 4,02%, Kota Bima 1,03% dan yang terakhir sekaligus yang memiliki luas wilayah paling kecil yaitu Kota Mataram 0,30%.

Setelah mengetahui luas daerah NTB dengan rinci, kemudian dipaparkan jumlah penduduk serta jumlah kecamatan yang ada pada masing-masing Kabupaten/Kota. Pada tabel di bawah diketahui bahwa masing-masing Kabupaten memiliki ibu kota dan jumlah penduduk yang berbeda-beda. Dimana Kabupaten Lombok Timur memiliki jumlah penduduk yang paling banyak, diikuti oleh Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa, Kota Mataram, Kabupaten Dompu, Kabupaten Lombok Utara, Kota Bima dan yang terakhir sekaligus yang memiliki jumlah penduduk yang paling kecil adalah Kabupaten Sumbawa Barat. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel 4.3.

Table 2. Luas Daerah Provinsi NTB Dirinci Menurut Kabupaten/Kota

Kota/Kabupaten Nusa Tenggara Barat	Luas (Km ²)	Persentase (%)
Kabupaten Bima	4.389,40	21,78
Kabupaten Dompu	2.324,60	11,53
Kabupaten Lombok Barat	1.053,92	5,23
Kabupaten Lombok Tengah	1.208,40	6,00

Kabupaten Lombok Timur	1.605,55	7,97
Kabupaten Lombok Utara	809,53	4,02
Kabupaten Sumbawa	6.643,98	32,97
Kabupaten Sumbawa Barat	1.849,02	9,17
Kota Bima	207,50	1,03
Kota Mataram	61,30	0,30
Jumlah/Total	20.153,2	100,00

Sumber : NTB dalam angka 2015

Tabel.3. Jumlah Penduduk pada Provinsi NTB

Kota/Kabupaten Nusa Tenggara Barat	Jumlah kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk
Kabupaten Bima	19	4.389,40	439.228
Kabupaten Dompu	8	2.324,60	218.973
Kabupaten Lombok Barat	10	1.053,92	599.986
Kabupaten Lombok Tengah	12	1.208,40	860.209
Kabupaten Lombok Timur	20	1.605,55	1.105.582
Kabupaten Lombok Utara	5	809,53	200.072
Kabupaten Sumbawa	24	6.643,98	415.789
Kabupaten Sumbawa Barat	8	1.849,02	114.951
Kota Bima	5	207,50	142.579
Kota Mataram	3	61,30	402.843

Sumber : NTB dalam angka 2015

Selanjutnya akan dipaparkan sebaran terkait dengan jumlah UMKM yang terdapat pada masing-masing Kabupaten/Kota yang ada di NTB. Dimana total jumlah pelaku usaha UMKM NTB adalah sebanyak 649.027 unit. Sesuai dengan tabel 4.4 dapat dirincikan Kabupaten/Kota mana saja yang memiliki jumlah pelaku usaha UMKM dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kabupaten Lombok Timur merupakan daerah yang memiliki jumlah UMKM tertinggi yaitu sebanyak 161.264 unit usaha atau 24,85 %, Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 19,94%, kemudian Kabupaten Lombok Barat 18,66 %, Kota Mataram 8,96 %, Kabupaten Bima



8,26 %, Kabupaten Sumbawa 7,33 %, Kabupaten Dompu 4,42 %, Kota Bima 3,88 %, Kabupaten Sumbawa Barat 2,57 % dan yang memiliki jumlah UMKM terkecil adalah Kabupaten Lombok Utara yaitu sebanyak 7.411 unit usaha atau 1,14%.

Sedangkan untuk jumlah sentra Industri Kecil Menengah (IKM) yang tersebar di masing-masing Kabupaten/Kota di NTB terdapat sebanyak 2.213 unit sentra usaha. Dimana Kota Mataram memiliki sentra IKM dengan jumlah tertinggi yaitu sebanyak 415 unit atau 18,75%, selanjutnya diikuti oleh Kabupaten Lombok Tengah di tempat kedua dengan jumlah sentra sebanyak 403 unit atau 18,21 %, kemudian Kabupaten Lombok Barat 15,54%, Kabupaten Lombok Timur 12,56%, Kabupaten Lombok Utara 9,40 %, Kabupaten Bima 8,54%, Kabupaten Dompu 6,60%, Kabupaten Sumbawa Barat 4,79%, Kota Bima 3,30%, dan Kabupaten Sumbawa memiliki jumlah sentra IKM yang paling rendah yaitu sebanyak 51 unit atau sebesar 2,30%. Lebih jelasnya terdapat pada tabel 4.5.

Tabel 4. Jumlah UMKM Berdasarkan Kota/Kabupaten di NTB

Jumlah UMKM	Kota/Kabupaten Nusa Tenggara Barat	Jumlah (%)
53.614	Kabupaten Bima	8,26
28.660	Kabupaten Dompu	4,42
121.106	Kabupaten Lombok Barat	18,66
129.433	Kabupaten Lombok Tengah	19,94
161.264	Kabupaten Lombok Timur	24,85
7.411	Kabupaten Lombok Utara	1,14
47.555	Kabupaten Sumbawa	7,33
16.655	Kabupaten Sumbawa Barat	2,57
25.170	Kota Bima	3,88
58.159	Kota Mataram	8,96
649.027	TOTAL	100

Sumber : data Sekunder dinas Kemenkop NTB 2018 (data diolah)

Tabel 5. Jumlah IKM Berdasarkan Kota/Kabupaten di NTB

Jumlah Sentra IKM	Kota/Kabupaten Nusa Tenggara Barat	Jumlah (%)
189	Kabupaten Bima	8,54
146	Kabupaten Dompu	6,60
344	Kabupaten Lombok Barat	15,54
403	Kabupaten Lombok Tengah	18,21
278	Kabupaten Lombok Timur	12,56
208	Kabupaten Lombok Utara	9,40
51	Kabupaten Sumbawa	2,30
106	Kabupaten Sumbawa Barat	4,79
73	Kota Bima	3,30
415	Kota Mataram	18,75
2.213	TOTAL	100

Sumber : data sekunder dinas Perindustrian 2016 (data diolah)

PENUTUP

Kesimpulan

Terbatas pada kajian penelitian ini serta berdasarkan pada hasil dan pembahasan penelitian yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bencana gempa bumi Lombok tidak hanya menimbulkan kerugian materi saja tetapi juga psikis. Berdasarkan kerusakan dan kerugian, Kabupaten Lombok Utara merupakan daerah terdampak gempa tertinggi, diikuti oleh Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Kota Mataram serta wilayah terdampak lainnya.
2. Pemerintah pusat bekerja bersama-sama dengan pemerintah daerah melakukan pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi, khususnya bagi dunia usaha guna mengatasi perekonomian yang melambat melalui program-program pemulihan UMKM/IKM (restrukturisasi utang, dana stimulan, program pemasaran, pembinaan dan pengembangan)
3. Wilayah yang luas tidak selalu diikuti oleh kepadatan jumlah penduduk yang tinggi. Begitu pula kepadatan jumlah penduduk dengan jumlah pelaku usaha UMKM/IKM tidak selalu berkorelasi positif. Jumlah UMKM tertinggi berada di Kabupaten Lombok Timur 24,85 %,



Kabupaten Lombok Tengah 19,94 %, Kabupaten Lombok Barat 18,66 %, Kota Mataram 8,96 %, Kabupaten Bima 8,26 %, Kabupaten Sumbawa 7,33 %, Kabupaten Dompu 4,42 %, Kota Bima 3,88 %, Kabupaten Sumbawa Barat 2,57 % dan yang memiliki jumlah UMKM terkecil adalah Kabupaten Lombok Utara yaitu sebesar 1,14%.

4. Sedangkan untuk jumlah IKM, walaupun dari segi luas wilayah dan kepadatan penduduk tidak menempati urutan 3 teratas, namun Kota Mataram memiliki sentra IKM dengan jumlah tertinggi yaitu sebesar 18,75%, selanjutnya diikuti oleh Kabupaten Lombok Tengah di tempat kedua dengan 18,21 %, kemudian Kabupaten Lombok Barat 15,54%, Kabupaten Lombok Timur 12,56%, Kabupaten Lombok Utara 9,40 %, Kabupaten Bima 8,54%, Kabupaten Dompu 6,60%, Kabupaten Sumbawa Barat 4,79%, Kota Bima 3,30%, dan Kabupaten Sumbawa memiliki jumlah sentra IKM yang paling rendah yaitu sebesar 2,30%.
5. Mengingat terbatasnya sumberdaya, maka pelaksanaan program-program pemulihan UMKM/IKM didasarkan kepada urutan daerah yang mengalami kerusakan terparah yaitu Kabupaten Lombok Utara, diikuti oleh Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah dan Kota Mataram serta wilayah terdampak lainnya.

Saran

1. Untuk menjamin efektifitas program pemulihan UMKM/IKM, diharapkan kepada pihak-pihak terkait untuk mempelajari lebih jauh apa jenis kegiatan pemulihan yang sesuai atau cocok, bagaimana mekanisme pelaksanaan dan masalah teknis lainnya.

2. Dukungan dari berbagai pihak, baik itu pemerintah, lembaga-lembaga kemasyarakatan, maupun masyarakat itu sendiri mutlak diperlukan untuk terselenggaranya program-program pemulihan UMKM/IKM yang adil, aman dan kondusif.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agustiyo, T. (2011). *Fungsi Kelompok Usaha Dalam Kegiatan Ekonomi Pasca Bencana Di Pangandaran*. 22, 97–112.
- [2] Antara. (2018). Analisis BMKG Soal Gempa Bumi Bali-NTB yang Terjadi 29 Juli 2018. Retrieved July 13, 2019, from tirto.id website: <https://tirto.id/analisis-bmkg-soal-gempa-bumi-bali-ntb-yang-terjadi-29-juli-2018-cP6c>
- [3] Antaranews.com. (2019, February 19). Kemenkop terapkan strategi pemulihan UMKM pasca-bencana di NTB dan Sulteng. Retrieved July 13, 2019, from Antara News website: <https://www.antaranews.com/berita/800226/kemenkop-terapkan-strategi-pemulihan-umkm-pasca-bencana-di-ntb-dan-sulteng>
- [4] BeritaSatu.com. (n.d.). Pascagempa Lombok, Ditjen IKMA Kemperin Bangkitkan Kembali Roda Industri. Retrieved July 25, 2019, from beritasatu.com website: <https://www.beritasatu.com/nasional/551590/pascagempa-lombok-ditjen-ikma-kemperin-bangkitkan-kembali-roda-industri>
- [5] BNPB. (2008). *Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pedoman Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana*. Bnpb.
- [6] BNPB. (2012). *Buku Saku Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana* (Edisi 2012). BNPB.
- [7] BNPB. (n.d.). Definisi dan Jenis Bencana. Retrieved July 16, 2019, from Badan Nasional Penanggulangan Bencana website: <https://bnpb.go.id>



- [8] Chairunnisa, N. (2018, August 13). Kerugian Ekonomi Akibat Gempa Lombok Capai Rp 5,04 Triliun. Retrieved July 25, 2019, from Tempo website: <https://nasional.tempo.co/read/1116615/kerugian-ekonomi-akibat-gempa-lombok-capai-rp-504-triliun>
- [9] Dinas Koperasi NTB Siapkan Dana Stimulan UKM Korban Gempa. (2018, October 9). Retrieved July 25, 2019, from Cendana News website: <https://www.cendananews.com/2018/10/dinas-koperasi-ntb-siapkan-dana-stimulan-ukm-korban-gempa.html>
- [10] Fahren, Z. U. (2011). *Kinerja Usaha Mikro Kerajinan Pasca Bencana Di Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Ciamis*. 22, 81–96.
- [11] Gozali, I. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS* (Edisi 3). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [12] Hidayat, A. A. N. (2018a, September 10). Ini Data Lengkap Kerusakan Gempa Lombok Versi BNPB. Retrieved July 13, 2019, from Tempo website: <https://bisnis.tempo.co/read/1125319/ini-data-lengkap-kerusakan-gempa-lombok-versi-bnpb>
- [13] Hidayat, A. A. N. (2018b, November 6). Karena Gempa, BPS Catat Pertumbuhan Ekonomi NTB Paling Rendah. Retrieved July 13, 2019, from Tempo website: <https://bisnis.tempo.co/read/1143645/karena-gempa-bps-catat-pertumbuhan-ekonomi-ntb-paling-rendah>
- [14] Jauhari, J. (2010). *Upaya Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) Dengan Memanfaatkan E-Commerce*. 2, 159–168.
- [15] Kemenkumham. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007*. Kemenkumham.
- [16] Kemenperin Susun Strategi Pengembangan IKM Tahun 2020 di Lombok. (n.d.). Retrieved July 25, 2019, from http://rri.co.id/mataram/post/berita/667052/ekonomi/kemenperin_susun_strategi_pengembangan_ikm_tahun_2020_di_lombok.htm
- [17] Kepala Biro Bidang Perekonomian dan Industri. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*.
- [18] Kurniasari, N. (2017). *Strategi Penanganan Krisis Kepariwisata dalam Kebijakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)*. *MediaTor*, 10, 177–189.
- [19] Lestari, E. P. (2010). *Penguatan Ekonomi Industri Kecil Dan Menengah Melalui Platform Kluster Industri*. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 6, 146–157.
- [20] Ling, A. (2013). *Pengelolaan Dan Pengembangan Usaha Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Deskriptif Pada Rumah Makan Palem Asri Surabaya)*. *AGORA*, 1.
- [21] medcom id, developer. (2018, October 8). Memulihkan Ekonomi Pascabencana. Retrieved July 25, 2019, from medcom.id website: <https://www.medcom.id/ekonomi/analisa-ekonomi/RkjRqWVvk-memulihkan-ekonomi-pascabencana>
- [22] Media, K. C. (n.d.-a). INFOGRAFIK: Gempa Lombok 5 Agustus 2018. Retrieved July 13, 2019, from KOMPAS.com website: <https://regional.kompas.com/read/2018/08/06/13291101/infografik-gempa-lombok-5-agustus-2018>
- [23] Media, K. C. (n.d.-b). Melihat Kembali Gempa Lombok 2018 dan Sejarah Kegempaanannya. Retrieved July 13, 2019, from KOMPAS.com website: <https://regional.kompas.com/read/2018/09/23/11321551/melihat-kembali-gempa-lombok-2018-dan-sejarah-kegempaanannya>
- [24] Memahami Pengertian Ukm Dan Ikm Berdasarkan Pandangan Ausi. (n.d.). Retrieved July 18, 2019, from <http://ausigeneral.blogspot.com/2016/09/memahami-pengertian-ukm-dan-ikm.html>
- [25] Menteri Perindustrian. (2016). *Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2016*. Menteri Perindustrian.



-
- [26] Nu'man, A. H. (2005). *Kebijakan Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Sebagai Upaya Untuk Menghadapi Era Perdagangan Bebas (Suatu Model Konseptual Dalam Pengembangan IKM)*. XXI, 388–415.
- [27] Republika.co.id. (2019, January 29). BI Dukung Pengembangan UMKM NTB. Retrieved July 15, 2019, from Republika Online website: <https://republika.co.id/share/pm3ilx423>
- [28] Sekaran, U. (2006). *Research Methods For Business (Metodologi Penelitian untuk Bisnis)* (Edisi 4). Salemba Empat.
- [29] Setiageni, S. (2011). *Proses Pemulihan Bencana Gempa Pada Tahun 2009 Di Kota Padang (Studi Kasus Upaya Pemulihan yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Padang)*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial.
- [30] Sicca, S. P. (2018). Pemulihan Wilayah yang Terdampak Gempa Lombok Ditarget Tuntas 2020. Retrieved July 25, 2019, from tirto.id website: <https://tirto.id/pemulihan-wilayah-yang-terdampak-gempa-lombok-ditarget-tuntas-2020-cVv4>
- [31] Usman, & Pakarti, P. (2016). *Potensi Pengembangan Industri Kecil Desa Vokasi (Studi pada Desa Vokasi Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo)*. INFOKAM, 12.
- [32] Wuryandani, D., & Meilani, H. (2013). *Peranan Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 4 No 1.



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN